

**Faktor-faktor Keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Biro
Umum dan Ruma Setda Provinsi Jawa Timur**

Vony Aliefia¹⁾, Oktarizka Reviandani²⁾

^{1), 2)} Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur
21041010146@student.upnjatim.ac.id.¹⁾ oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id²⁾

ABSTRACT

Official travel is carried out by authorized officials to attend invitations, meetings, seminars, and so on, especially in government. Service Travel Order (SPPD) as proof of accountability for carrying out official travel. In working on SPPD, it is not always smooth and timely because there are many obstacles that cause delays which have an impact on the slow disbursement of proposed official travel funds. Researchers used 4 main focuses in the study to determine the factors of SPPD delays, namely (1) Human Resources Factors, (2) Internal Control, and (3) Technology and information factors and. (4) Dominant Factors The research method used by researchers is descriptive qualitative with data collection techniques in-depth interviews, observation, and documentation. The results of this study are (1) Human Resources Factors, have worked quickly in accordance with existing regulations, (2) Internal Control, internal factors still cannot be controlled because the mobility of the leader concerned has a busy schedule resulting in a buildup of files and stagnation of the submission process. External factors can still be followed up by implementers regarding the timeliness of sending invoices, because invoices are the main administrative requirement in SPPD. (3) Technology and Information Factors, which still use manual methods in their work, namely using Microsoft excel, so that a lot of work is not automatic and synchronized between one file and another, (4) Dominant Factors, delays are dominated by the mobility of busy leaders and supporting documents that are submitted late. This problem is a factor in the delay of SPPD.

Keywords: *Official travel; Lateness; Administration*

ABSTRAK

Perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menghadiri undangan, rapat, seminar, dan lain sebagainya terutama di pemerintahan. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pertanggungjawaban karena telah melaksanakan perjalanan dinas. Di dalam pengerjaan SPPD tidak selalu lancar dan tepat waktu dikarenakan banyak kendala yang mengakibatkan keterlambatan yang berdampak pada lambatnya pencairan dana perjalanan dinas yang diajukan. Peneliti menggunakan 4 fokus utama dalam penelitian untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan SPPD yaitu (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Pengendalian Intern, dan (3) Faktor teknologi dan informasi dan. (4) Faktor Dominan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data secara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu (1) Faktor Sumber Daya Manusia, telah bekerja dengan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada, (2) Pengendalian Intern, faktor internal masih belum bisa dikendalikan karena mobilitas pemimpin yang bersangkutan memiliki jadwal yang padat sehingga terjadi penumpukan berkas dan stagnansi proses pengajuan. Faktor eksternal masih bisa untuk di *follow up* oleh pelaksana terkait ketepatan waktu dalam pengiriman *invoice*,

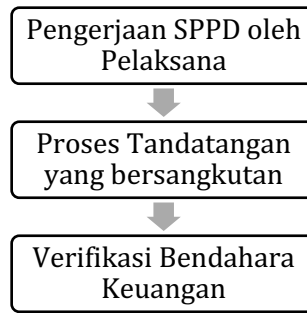
sebab *invoice* menjadi syarat administrasi yang utama dalam SPPD.(3) Faktor Teknologi dan Informasi, yang masih menggunakan cara manual dalam pengerjaannya yaitu menggunakan Microsoft Excel, sehingga banyak pengerjaan yang tidak otomatis dan sinkron antara berkas yang satu dan lainnya., (4) Faktor Dominan, keterlambatan didominasi karena mobilitas pimpinan yang padat dan dokumen pendukung yang terlambat diserahkan. Masalah tersebut menjadi faktor atas keterlambatan SPPD.

Kata kunci: Perjalanan dinas; Keterlambatan; Administrasi

PENDAHULUAN

Perjalanan dinas kerap dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menghadiri undangan, rapat, seminar, dan lain sebagainya terutama di pemerintahan. Pada saat perjalanan dinas pastinya diperlukan biaya perjalanan dinas (Nur Afni Zunaidah, 2023). Ada 2 tipe perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga yang mengurus segala administrasi kegiatan Gubernur, Wakil, Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan memiliki biro-biro yang menunjang. Salah satu biro terbesar di Setda Prov Jatim ialah Biro umum utamanya di sub bagian rumah tangga yang bertugas untuk memelihara dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli mulai dari akomodasi yang meliputi BBM, *toll*, sewa kendaraan, tiket kereta api/pesawat/kapal, hotel, dan lain sebagainya yang dibutuhkan saat perjalanan dinas berlangsung. Hal tersebut dilakukan guna pemenuhan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang didalamnya meliputi Surat Perintah Tugas (SPT), rincian biaya perjalanan dinas, Lembar dua, dan Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya SPPD merupakan surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan Pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat undangan/disposisi yang ada dan ditandatangani oleh PA/KPA/KPAP dalam rangka perjalanan dinas. SPPD sangat penting dilakukan guna pengembalian dana yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Dalam pengerjaan SPPD tidak selalu lancar dan tepat waktu dikarenakan masih banyak kendala yang ada dan mengakibatkan keterlambatan pengerjaan SPPD. Keterlambatan merupakan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai yang disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan waktu menurut Ervianto (1998) dalam (Setiasa, 2012). Umumnya pengerjaan SPPD dilaksanakan maksimal 1 bulan sesuai dengan ketentuan setiap tahun oleh instansi. Namun dalam sub bagian rumah tangga melakukan pengerjaan SPPD hingga 2-3 bulan lamanya. Hal tersebut terjadi pada tahun terakhir 2021 – 2023. Keterlambatan yang ditimbulkan tersebut tentunya berpengaruh terhadap lambatnya pencairan dana perjalanan dinas, mengingat panjangnya proses dari pengerjaan SPPD hingga pencairan dana. Secara garis besar prosedur pengajuan SPPD sebagai berikut:



Bagan 1. Prosedur pengajuan SPPD

Sumber: Hasil observasi peneliti

Fenomena tersebut pasti dikarenakan suatu faktor tertentu baik dari internal maupun eksternal. Menurut Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yunus et al., 2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan surat pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Wajo menyimpulkan bahwa terdapat 3 faktor keterlambatan yakni (1) Sumber Daya Manusia, (2) Teknologi Informasi, dan (3) pengendalian Intern (4) Faktor Dominan dengan hasil penyebab utamanya ialah keterlambatan penyampaian dokumen pendukung perjalanan dinas.

Dalam upaya mengatasi problematisasi tersebut maka diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan yang menjadi penyebab atas fenomena tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik pengambilan data secara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada pelaksana SPPD yang relevan dengan fenomena yang diamati dan memakai logika yang berkaitan dengan faktor-faktor terlambatnya SPPD. Informan pada penelitian ini yakni pelaksana SPPD yang dipilih oleh peneliti sesuai keterlibatan dalam pengerjaan SPPD. Dalam pemilihan informan tersebut guna keakuratan data dan terpercaya. Adapun 2 informan dalam penelitian ini sebagai pelaksana SPPD yaitu 1 Kepala Pelaksana SPPD dan 1 Asisten Tenaga Individu SPPD.

Adapun 4 fokus utama dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan teori (Yunus et al., 2021) yaitu (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Pengendalian intern, dan (3) Faktor teknologi dan informasi dan (4) Faktor Dominan. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah di sub bagian rumah tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan dinas utamanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pejabat-pejabatnya sering dilakukan dan terdapat anggaran perjalanan dinas yang diberikan oleh negara kepada setiap provinsi maupun setiap instansi. Dalam proses pengerjaan SPPD tentunya terdapat kendala yang di alami oleh pelaksana SPPD yang mengakibatkan adanya fenomena keterlambatan yang berdampak pada pencairan dana pejabat yang bersangkutan. Keterlambatan ini dialami 3 tahun terakhir mulai dari 2021 hingga 2023 saat ini dengan rentan waktu pengerjaan yang seharusnya maksimal 1 bulan menjadi 2 hingga 3 bulan lamanya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor keterlambatan tersebut. Berdasarkan penyebab faktor-faktor keterlambatan pengerjaan SPPD yaitu:

1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan yang mengatur antara hubungan dan peran karyawan supaya terciptanya keefektifan dan efisiensi guna mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2016). Sumber Daya Manusia dapat disebutkan sebagai manusia atau pegawai yang melakukan pertanggungjawaban dalam proses pengerjaan yang diemban olehnya (Sari, 2013). Serta memiliki Dalam hal ini SDM yang dimaksud ialah pelaksana SPPD yang mengerjakan mulai dari pengajuan hingga selesai. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pelaksana SPPD guna menyelesaikan SPPD perlu dijaga dan dipelihara oleh pimpinan sub bagian rumah tangga sebab termasuk aset dan unsur penting yang dimiliki oleh bagian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mendapatkan hasil penelitian bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pelaksana SPPD telah bekerja sesuai, baik, dan cepat dengan tugas yang mereka emban dan mengerjakan SPPD sesuai dengan alur atau proses, dan ketentuan yang berlaku, jika dokumen yang diperlukan lengkap dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku di pedoman umum. Serta proses pengerjaan SPPD tergantung dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap atau tidak. Secara umum, dalam pengerjaan, pelaksana telah cepat dalam pengerjaan dalam 1 hari, tergantung pada dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan yang diberikan kepada pelaksana lengkap dan sesuai dengan ketentuan pedoman pagu yang ada.

Kemudian ditambahkan oleh Saudara Thoriq selaku Asisten Pelaksana SPPD Sub Bagian Rumah Tangga Setda bahwa dari pihak pelaksana maupun asisten pelaksana pengerjaannya tergantung berapa banyak berkas yang masuk ke pelaksana. Jikalau banyak berkas masuk maka pengerjaannya sekitar 2 sampai 3 hari dan jika berkas yang masuk ke pelaksana sedikit, maka 1 hari bisa diselesaikan. Setelah pengerjaan, biasanya masih terdapat revisi dari asisten pimpinan terkait mulai dari harga akomodasi yang berubah dan lain sebagainya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD Sub Bagian Rumah Tangga, bahwa proses pengerjaan SPPD tergantung dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap atau tidak. Secara umum, dalam pengerjaan, pelaksana

telah cepat dalam pengerjaan dalam 1 hari, tergantung pada dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan yang diberikan kepada pelaksana lengkap dan sesuai dengan ketentuan pedoman pagu yang ada. Kemudian ditambahkan oleh Saudara Thoriq selaku Asisten Pelaksana SPPD Sub Bagian Rumah Tangga Setda bahwa dari pihak pelaksana maupun asisten pelaksana pengerjaannya tergantung berapa banyak berkas yang masuk ke pelaksana. Jikalau banyak berkas masuk maka pengerjaannya sekitar 2 sampai 3 hari dan jika berkas yang masuk ke pelaksana sedikit, maka 1 hari bisa diselesaikan. Setelah pengerjaan, biasanya masih terdapat revisi dari asisten pimpinan terkait mulai dari harga akomodasi yang berubah dan lain sebagainya.

Dari kedua informan tersebut ada sinkronisasi data antar keduanya, Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pegawai telah melaksanakan pengerjaan SPPD dengan cepat namun terdapat kendala pada bagian kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam SPPD. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam pengerjaan SPPD, jika dokumen salah seperti melebihi pagu terdapat revisi. Hal tersebut dapat mengakibatkan lambatnya pengerjaan SPPD, sebab masih menunggu revisi dokumen dari asisten pimpinan.

2) Pengendalian Intern

Pengendalian intern ialah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Di dalam pengendalian intern terdapat faktor internal dan eksternal (Yunus et al., 2021). Menurut Casey (2004:65) dalam (Irwanty Parura, 2021) terdapat faktor internal (kesalahan pengerjaan, gangguan fungsi struktural, dan biaya operasional) dan eksternal (faktor alam dan ketidakpastian penggunaan fungsi) yang mempengaruhi keterlambatan pengerjaan. Dalam pengerjaan SPPD terdapat 2 faktor yang mendukung selesainya SPPD tersebut, yakni dari faktor internal (pegawai atau pejabat yang bersangkutan) dan faktor eksternal (mitra Perusahaan travel /hotel/dan lain sebagainya). Kedua faktor tersebut menjadi dasar atas keterlambatan pengerjaan SPPD yang ada, sesuai dan saling berkaitan dengan hasil penelitian pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

A) Faktor Internal

Pada proses setelah SPPD dinilai cukup lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan maka tahap selanjutnya ialah proses pengajuan tanda tangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pada tahap tersebut cukup banyak memakan waktu, karena setiap pimpinan atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam SPPD tersebut tidak selalu ada di kantor. Hal tersebut disebabkan karena mereka melakukan perjalanan dinas baik luar kota dan luar negeri terutama pimpinan seperti kepala biro, kepala bendahara keuangan, dan lainnya. Mereka sering kali melakukan perjalanan dinas yang cukup lama. Maka dari itu banyak dokumen-dokumen SPPD yang menumpuk kepada yang bersangkutan sehingga terjadi keterlambatan SPPD.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD Sub Bagian Rumah Tangga yang menuturkan bahwasanya proses pengerjaan SPPD cepat, namun pada saat proses tandatangan kepada pimpinan atau pihak yang melakukan perjalanan dinas maupun pihak-pihak terkait seperti Kepala Biro, Kepala Bagian Rumah Tangga, dan lainnya cukup memakan banyak waktu, soalnya mereka pimpinan dan sering melakukan perjalanan dinas.

Beliau juga menuturkan bahwa proses penandatanganan ini menjadi proses yang cukup menjadi faktor utama terlambatnya SPPD, karena prosesnya yang cukup Panjang, belum lagi saat di keuangan masih banyak biaya yang kurang sesuai atau adanya kesalahan dalam pengerjaan yang nantinya berimbas ke revisi dan meminta tandatangan ulang kepada yang bersangkutan. Proses penandatanganan ini bisa paling lama pernah 1 bulanan, itu pun belum ke step berikutnya. Jadi prosesnya masih panjang.

Adapun tambahan dari asisten pelaksana SPPD saudara Thoriq yang mengatakan bahwa sering kali Ketika sudah tertandatangani semua berkas dan hendak masuk ke verifikasi guna pencairan, masih terdapat kesalahan pengerjaan mulai dari terbilang nominal yang salah, ganti *invoice* hotel, dan lainnya. Lalu hal tersebut jika terdapat kesalahan, pelaksana wajib menaikkan berkas itu Kembali mulai dari tandatangan pimpinan, verifikasi, lalu ke bendahara lagi. Step ini cukup kompleks untuk SPPD dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya proses ini menjadi proses yang panjang dan lama.

Ibu Ovie juga menegaskan jikalau para pimpinan atau yang bersangkutan melakukan dinas luar ke luar negeri, yang bisa 1 minggu. Belum lagi dilanjut dengan dinas luar kota. Itu menjadi hal yang berat karena kemunduran atau proses tandatangannya cukup lama bisa 2 minggu hingga 3 mingguan. Karena di pimpinan pun bukan hanya berkas SPPD yang masuk tapi dari berbagai berkas dari sub bagian lain.

Dari kedua penuturan tersebut, menguatkan peneliti bahwasanya faktor internal berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pengerjaan SPPD tersebut. Singkatnya prosedur pengajuan SPPD secara umum ialah pengerjaan dari pelaksana dilanjut tandatangan yang bersangkutan dan yang terakhir ialah verifikasi guna pencairan dana yang telah diajukan. Oleh karena itu, faktor internal menjadi peran penting dalam mendukung percepatan pengerjaan SPPD dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya mobilitas pimpinan cukup padat dalam melakukan perjalanan dinas.

B) Faktor Eksternal

Di dalam SPPD terdapat rincian biaya yang memuat biaya penginapan, tiket pesawat atau kereta api maupun kapal, dan sewa kendaraan yang biasanya di himpun oleh pihak ketiga atau biasa disebut dengan perusahaan mitra travel yang berfungsi untuk pemesanan tiket, sewa kendaraan, atau penginapan tersebut. Dalam hal ini, pada proses pengerjaan SPPD dibutuhkannya administrasi pelengkap seperti *invoice* penginapan maupun transportasi. Sebagai pihak eksternal, Perusahaan mitra kerap

kali terlambat dalam penyampaian *invoice* kepada pelaksana. Sehingga hal tersebut mengakibatkan stagnansi pengerjaan SPPD sebab menunggu dikirimnya *invoice* perjalanan dinas terkait.

Hal tersebut juga dituturkan oleh Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD mengatakan bahwa pihak travel mengirimkan *invoice* terlambat hingga 1 minggu atau lebih. Kalau hal itu terjadi, pengerjaan berkas SPPD tidak bisa dilanjutkan, sebab *invoice* menjadi hal utama dalam bukti rincian perjalanan dinas. Jikalau *invoice* tidak ada maka tidak dapat diakui biaya yang dikeluarkan sejumlah tersebut. Selanjutnya ditambahkan oleh saudara Thariq selaku asisten pelaksana SPPD bahasannya *invoice* yang sudah dikirim masih bisa terdapat kesalahan mulai dari *typo* nominal, tertukarnya data *invoice*, dan pihak travel yang susah dihubungi. Hal itu yang menjadikan pengerjaan SPPD tertunda beberapa waktu

Dari hasil wawancara tersebut, antara keduanya selaras dalam problematisasi dari pihak ketiga atau travel yang menghambat pengerjaan SPPD dan sering kali menimbulkan keterlambatan. Seperti yang diketahui *invoice* menjadi administrasi penting sebagai bukti pendukung yang kuat dalam SPPD guna bukti rill pengeluaran biaya saat perjalanan dinas hingga dapat diakui dan dipercaya oleh bendahara keuangan maupun verifikasi.

3) Faktor Teknologi dan Informasi

Pada umumnya teknologi komunikasi dan informasi menjadi peran penting dalam arus globalisasi terutama digitalisasi pada pemerintahan (Mega, 2019) baik dalam pembuatan surat dan lain sebagainya. Dalam pengerjaan SPPD beberapa instansi sudah menggunakan teknologi guna pengerjaan secara *online* atau otomatis menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh instansi terbut. Namun sesuai dengan pengamatan peneliti, pengerjaan SPPD masih menggunakan cara manual yakni memakai Microsoft Excel. Penggunaan cara manual seperti tersebut juga menimbulkan terlambatnya pengerjaan SPPD karena butuh tenaga dan waktu yang cukup banyak. Tidak hanya itu pengelolaan arsip dokumen yang masih manual berpotensi pada data hilang dan rusak karena proses penyimpanan yang menggunakan *flashdisk* rentan hilang data, rusak, dan lainnya (Yulyanto et al., 2024).

Teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai komunikasi, melainkan guna sarana untuk berkoordinasi dan pembuatan dokumen penting seperti SPPD (Rahmatiah, 2016). Pembuatan SPPD seperti yang telah disinggung di atas, pengerjaannya masih manual dan belum bisa berbasis digitalisasi. Hal tersebut dikarenakan belum adanya inovasi keterbaharuan pada instansi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pembuatan SPPD secara manual tersebut dinilai kurang efektif dan efisien. Hal tersebut selaras dengan penuturan Ibu Ovie selaku Pelaksana SPPD bahwa pengerjaannya masih manual memakai Microsoft Excel, yang digital hanya penomoran surat yang menggunakan website sipeno.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut benar adanya yang masih menggunakan sistem manual dalam pengerjaannya. Sehingga

banyak kesalahan yang kerap terjadi seperti *typo* tujuan, nominal terbilang, tanggal terbit, dan lain sebagainya. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien karena jika menggunakan Excel antar lembar berbeda *file* yang mengakibatkan ketidaksinkronan antar data. Tentu saja hal tersebut menimbulkan keterlambatan karena harus mencetak ulang dokumen dan melakukan tahap dari awal yakni pengajuan tandatangan kembali kepada yang bersangkutan.

4) Faktor Dominan

Faktor dominan merupakan faktor yang paling berpengaruh besar terhadap keterlambatan pengerjaan SPPD. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD bahwasanya faktor dominan yang memiliki pengaruh besar dalam keterlambatan ialah mobilitas para pimpinan yang mengakibatkan stagnansi berkas di satu tempat. Serta pemberian dokumen pendukung seperti *invoice* atau surat pernyataan kerap terlambat dalam penyeteroran kepada pelaksana SPPD. Kedua hal tersebut menjadi faktor dominan yang berpengaruh atas terlambatnya SPPD dan berimbas pada pencairan dana yang terlambat juga. Maka dari itu peneliti dapat menarik inti bahwasanya mobilitas dan dokumen pendukung menjadi faktor dominan terlambatnya SPPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 4 faktor yang keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas yakni (1) Faktor Sumber Daya Manusia, telah bekerja dengan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada, (2) Pengendalian Intern, faktor internal masih belum bisa dikendalikan karena mobilitas pemimpin atau yang bersangkutan memiliki jadwal yang padat sehingga terjadi penumpukan berkas dan stagnansi proses pengajuan SPPD. Faktor eksternal masih bisa untuk di *follow up* terkait ketepatan waktu dalam pengiriman *invoice* terhadap pelaksana sebab *invoice* menjadi syarat administrasi yang utama dalam SPPD. (3) Faktor Teknologi dan Informasi, yang masih menggunakan cara manual dalam pengerjaannya yaitu menggunakan Microsoft Excel, sehingga banyak pengerjaan yang tidak otomatis dan sinkron antara berkas yang satu dan lainnya. Dan (4) Faktor Dominan, yang disebabkan oleh mobilitas pimpinan yang padat dan terlambatnya pengumpulan dokumen pendukung. Keempat faktor hal tersebut menjadi faktor-faktor keterlambatan SPPD di Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada yaitu adanya digitalisasi pengerjaan SPPD, supaya lebih efektif dan efisien. Serta meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan SPPD dan percepatan proses pengajuan SPPD. Ditinjau dari faktor dominan tersebut sebisa mungkin, para pelaksana SPPD harus manajemen waktu pengerjaan SPPD. Manajemen waktu perlu dilakukan oleh pelaksana SPPD untuk lebih meminimalisir terlambatnya pengajuan tandatangan pimpinan atau pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.*
- Irwanty Parura. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelaporan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Puskesmas Di Kabupaten Jayawijaya.* [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16086/2/K012191083_tesis bab 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16086/2/K012191083_tesis%20bab%201-2.pdf)
- Mega, M. (2019). *Efektifitas Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.* Universitas Puanggrimaggalatung Sengkang.
- Nur Afni Zunaidah. (2023). *Prosedur Administrasi Pencairan Dana Perjalanan Dinas Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Blitar.* [http://repository.unisbablitar.ac.id/1155/1/LAPORAN PKL_NUR AFNI Z_19106620001_1.pdf](http://repository.unisbablitar.ac.id/1155/1/LAPORAN%20PKL_NUR%20AFNI%20Z_19106620001_1.pdf)
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 7 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas <https://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/108/108.pdf> [Diakses: 26 Desember 2023]
- Rahmatiah, D. . (2016). *Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.* Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
- Sari, A. . (2013). *NPengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten.* Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
- Setiasa, W. (2012). *Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kabupaten Badung, Tesis (tidak dipublikasi).* Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Udayana.
- Yulyanto, W., Nur, S. A., & Pranoto, W. J. (2024). *Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Website Administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Driver (Studi Kasus : PT PLN (Persero) UP3 Samarinda).* 3(1).
- Yunus, A. A. W., Ismail, I., & Syamsiar. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Peratanggung Jawaban Keuangan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, Vol. 2*(No. 2), 625–636. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa>